



INDEKS PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF SEBAGAI INDIKATOR KUALITAS PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH

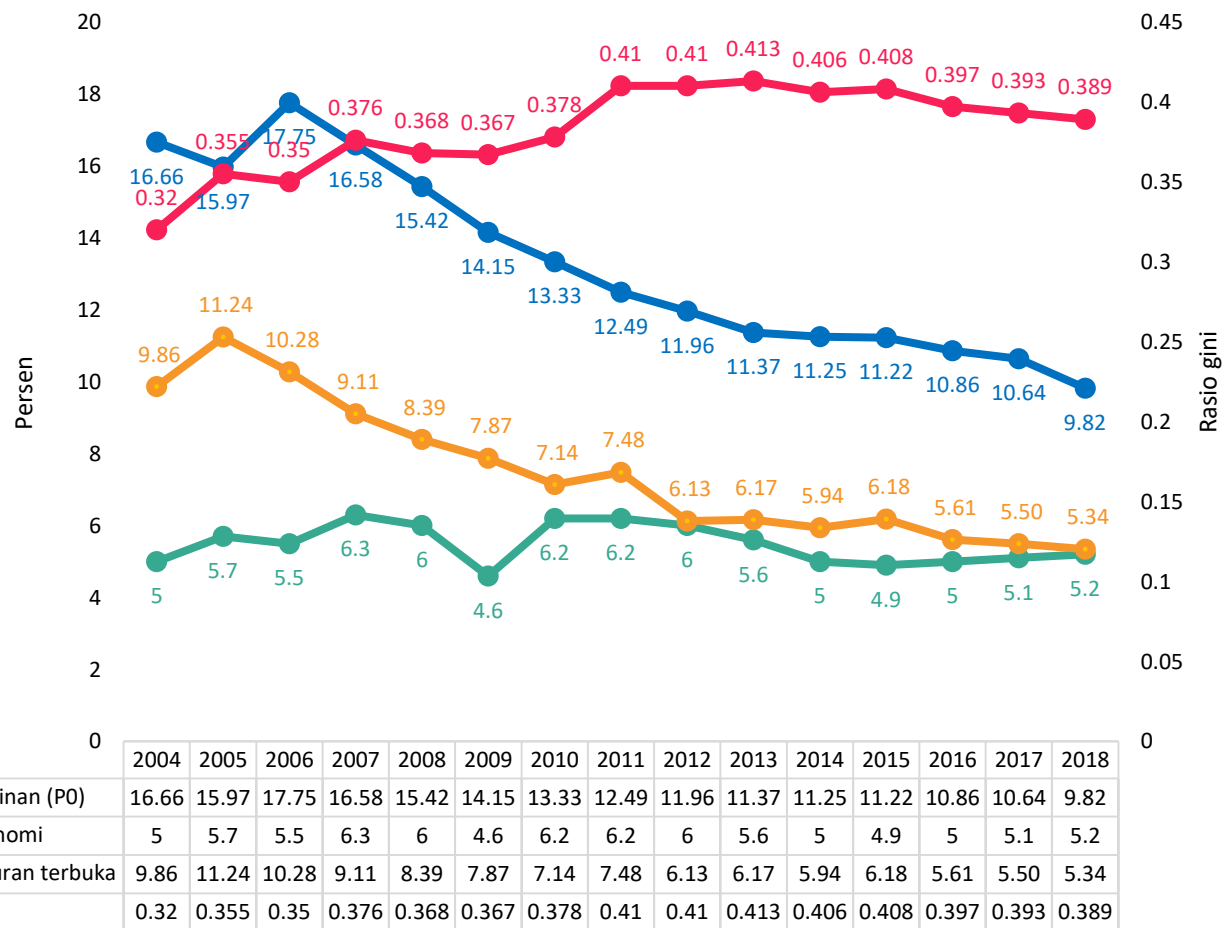
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Disampaikan pada:
Public Hearing Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif
Jakarta, 25 April 2019



Gambaran Kualitas Pembangunan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Kemiskinan, dan Rasio Gini

Pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan rasio gini (2004-2018)

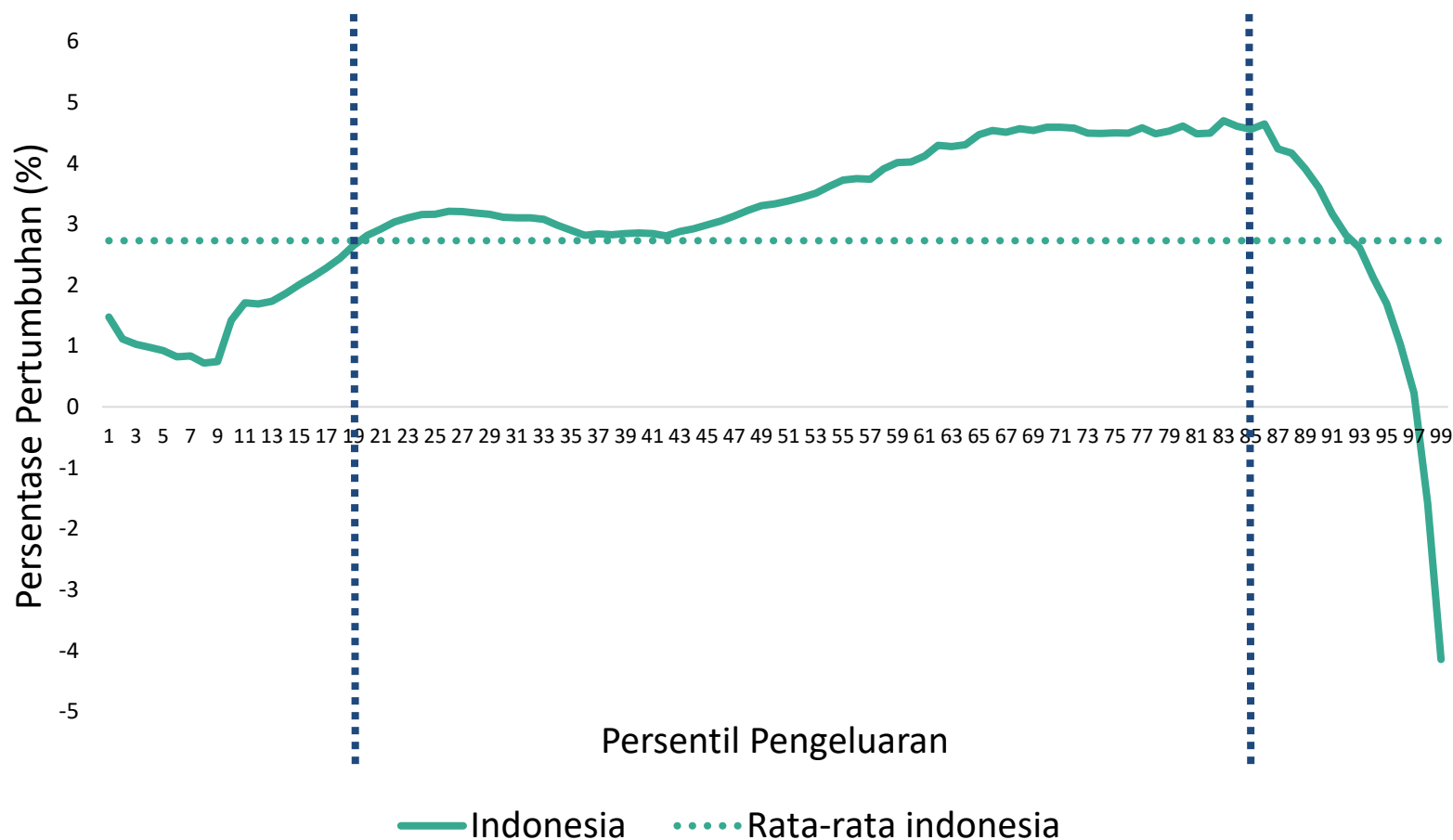


Sudahkah pertumbuhan ekonomi bersifat *Pro-Poor, Pro-Job, Pro-Growth, dan Pro-Equity?*

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu menurunkan kemiskinan dan pengangguran, namun ketimpangan walaupun meningkat, tren nya cenderung stagnan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih perlu ditingkatkan kualitasnya.



Gambaran Kualitas Pembangunan Ekonomi Pertumbuhan Konsumsi Perkapita 2015–2018

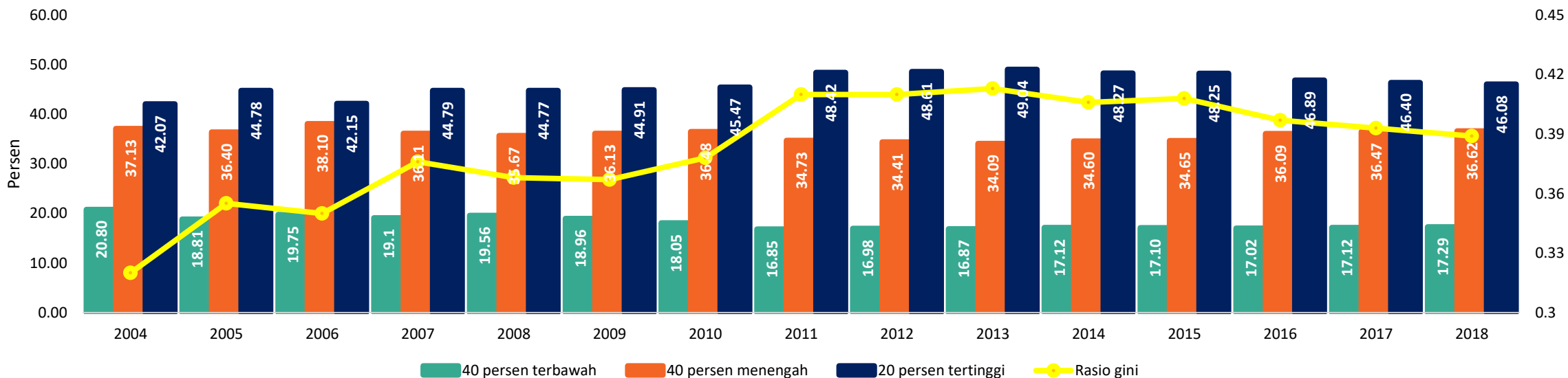


- Kelompok 20% Terbawah mengalami pertumbuhan konsumsi perkapita yang lebih rendah daripada rerata nasional, menunjukkan pertumbuhan konsumsi belum pro-poor.
- Sedangkan kelompok menengah (20-80%) tumbuh di atas rata-rata, dan kelompok 20% teratas mengalami pertumbuhan melambat



Gambaran Kualitas Pembangunan Ekonomi Trend & Dimensi Ketimpangan Indonesia:

Distribusi pengeluaran perkapita dan rasio antara kelompok pengeluaran, 2004-2018

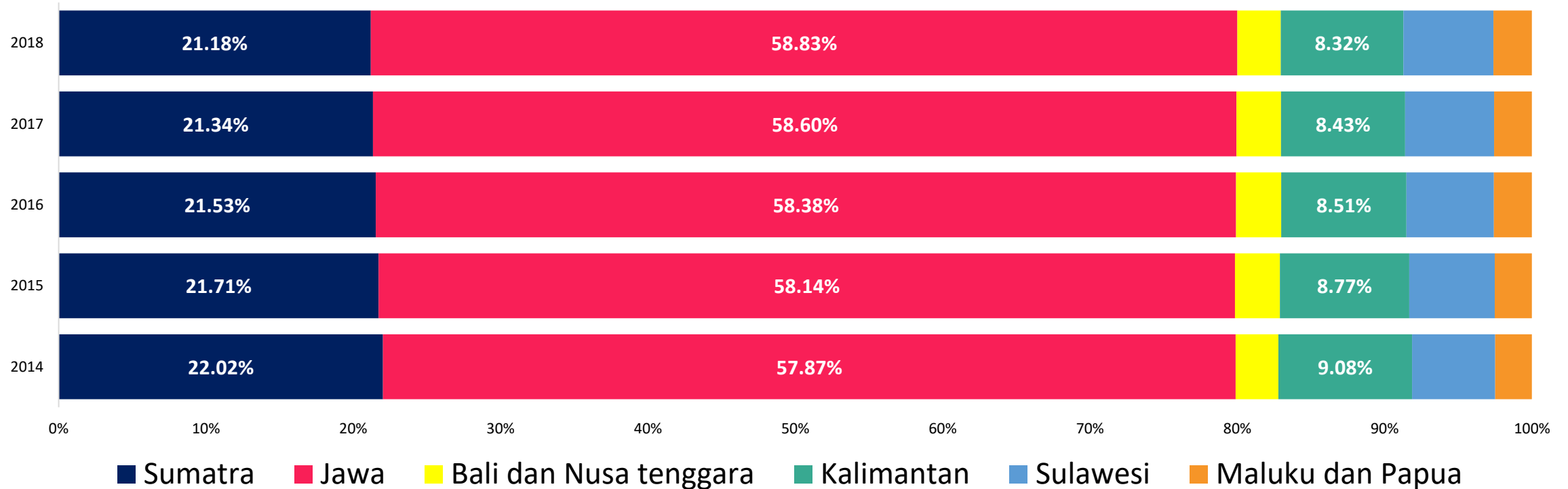


- Persentase “kue nasional” terbesar dinikmati oleh kelompok 20% pengeluaran tertinggi. Sedangkan kelompok 40% terendah hanya mendapatkan kurang dari 20% share pengeluaran sejak 2005.
- Sejak 2011, distribusi pengeluaran pada kelompok 20% tertinggi meningkat hingga tahun 2013. Kemudian pada 2014, distribusi pada kelompok ini mengalami penurunan dan beralih ke kelompok 40% menengah. Hal ini sejalan dengan peningkatan Rasio Gini yang signifikan di periode 2011-2014 kemudian menurun sedikit setelahnya.



Gambaran Kualitas Pembangunan Ekonomi Trend & Dimensi Ketimpangan Indonesia:

Distribusi PDB berdasar Pulau 2014-2018

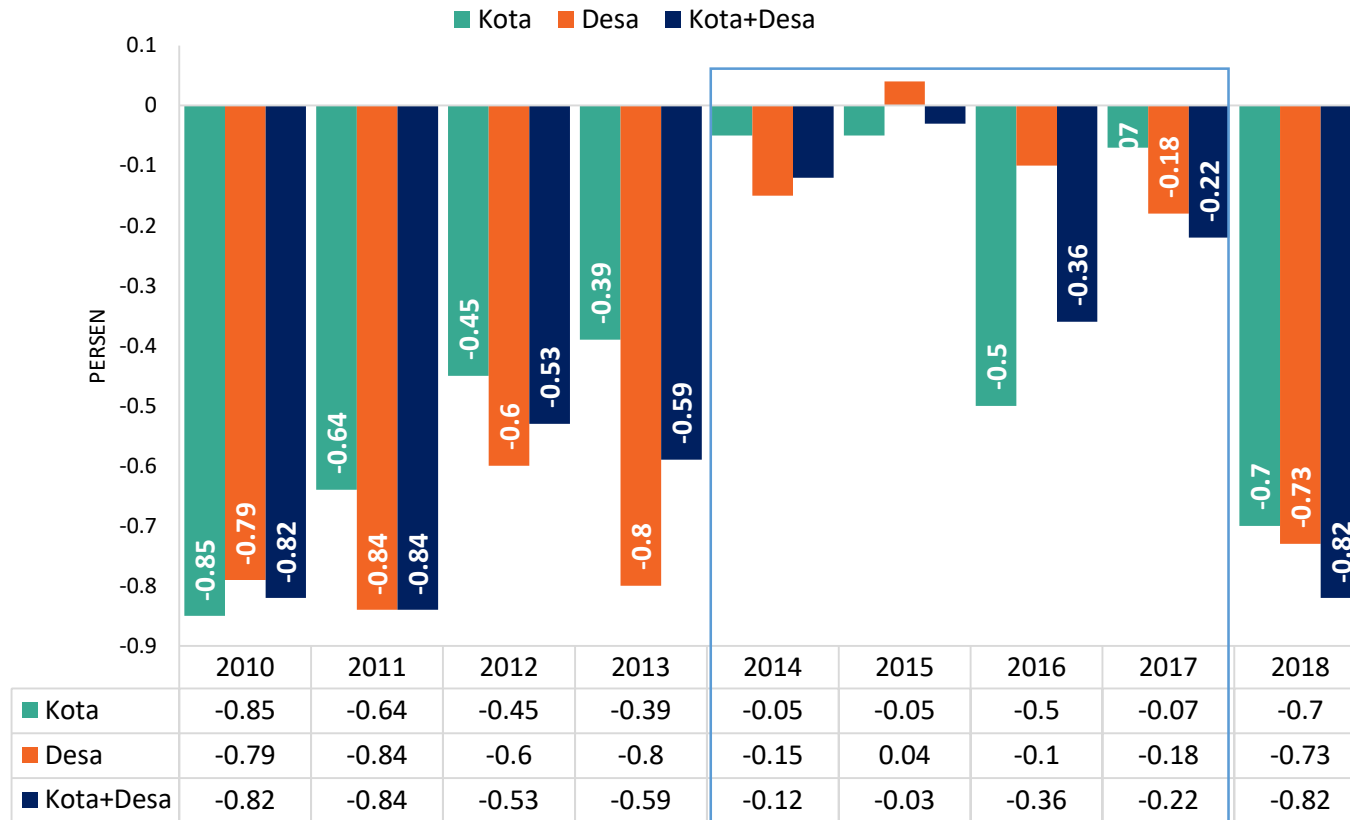


- Struktur perekonomian Indonesia secara spasial tidak berubah dalam 4 tahun terakhir, didominasi provinsi-provinsi di Pulau Jawa (58%), Sumatera (22%), sisanya dari pulau-pulau lainnya.
- Perekonomian Indonesia juga masih terkonsentrasi di Kawasan Barat Indonesia (KBI), sekitar 80-81%. Sisanya, sekitar 19-20% berasal dari Kawasan Timur Indonesia (KTI).
- Kedua hal tersebut menunjukkan ketimpangan antar wilayah yang ada di Indonesia



Gambaran Kualitas Pembangunan Ekonomi

Penurunan Angka Kemiskinan Cenderung Melambat



Sumber: BPS

Secara umum, kemiskinan di perdesaan masih lebih tinggi dari perkotaan. Walaupun pada periode 2017-2018 penurunan kemiskinan di perdesaan lebih tinggi dari penurunan di perkotaan.

Penurunan angka kemiskinan selama periode 2014-2017 sebesar 0.61 *percentage points* (pp) atau turun sebesar 0.15 pp per tahunnya dimana angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan penurunan sebesar 1,96 pp atau 0.49 pp per tahunnya pada periode 2010-2013.

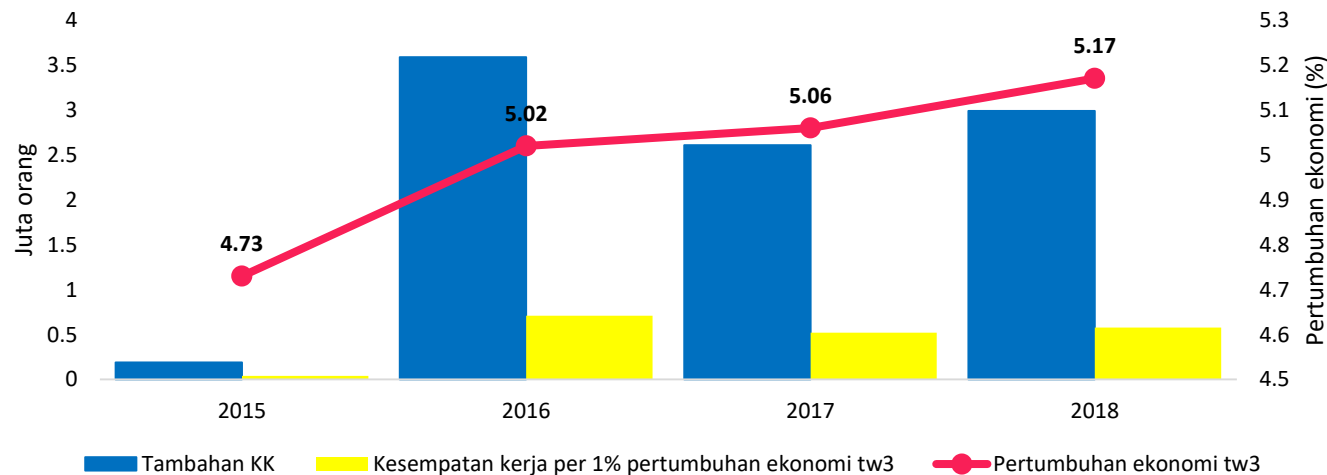
Faktor-Faktor Penjelaras Penurunan Kemiskinan Maret 2018 (Sumber: BPS 2018)

- Inflasi umum pada periode September 2017-Maret 2018: **1,92 persen**
- Rata-rata pengeluaran perkapita/bulan untuk rumah tangga yang berada di 40 persen lapisan terbawah selama periode September 2017-Maret 2018 **tumbuh 3,06 persen**.
- Bantuan sosial tunai dari pemerintah **tumbuh 87,6 persen** pada Triwulan 1 2018, lebih tinggi dibanding Triwulan 1 2017 yang hanya tumbuh 3,39 persen.
- Program beras sejahtera (Rastr) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Triwulan I telah **tersalurkan sesuai jadwal**
- Nilai Tukar Petani (NTP) pada Maret 2018 berada di atas angka 100, **yaitu 101,94**.



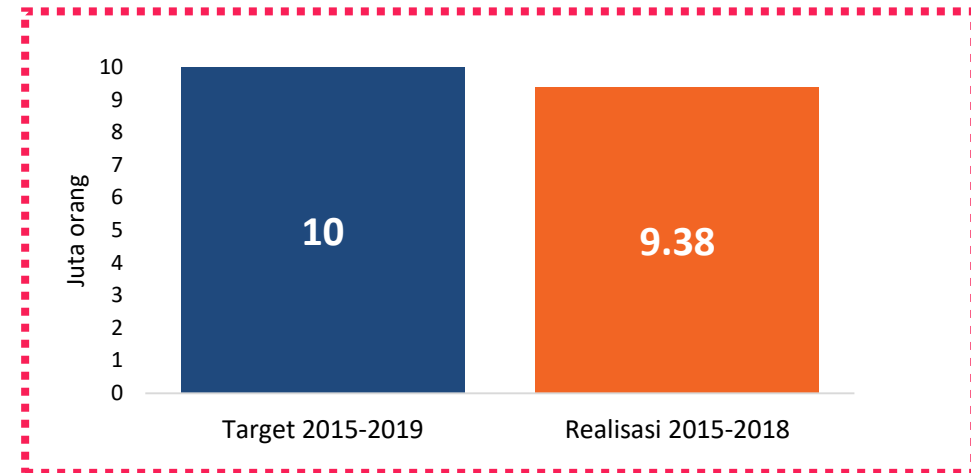
Gambaran Kualitas Pembangunan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja

Pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan kesempatan kerja



Sumber : Direktorat Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (TKPKK) Bappenas

Target dan realisasi penciptaan kesempatan kerja (Juta orang)



Penciptaan kesempatan kerja melebihi target RKP dan RPJMN 2015-2019

- Jumlah penciptaan lapangan kerja 2016-2018 **adalah 9.38 juta**
- Rata-rata pertumbuhan kesempatan kerja 5 tahun terakhir **adalah sebesar 2%**
- Penciptaan lapangan kerja terus didorong melalui : (1) **investasi padat pekerja** di sektor bernilai tambah tinggi dan di sektor sumber pertumbuhan baru (parawisata, ekonomi kreatif, ekonomi digital) (2) **Penumbuhan kewirausahaan**, (3) **Peningkatan ekspor dan penguatan rantai pasok**





Target Pembangunan Tahun 2020

Indeks Pembangunan
Manusia (IPM)
(nilai)

72,5



Tingkat Kemiskinan
(persen)

8,5 – 9,0

Pertumbuhan Ekonomi
(persen)

5,3 - 5,5



Gini Rasio
(indeks)

0,375 – 0,380

Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT)
(persen)

4,8-5,1





Indonesia Perlu Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif



Pendekatan pembangunan yg terlalu berorientasi kepada pertumbuhan, telah menghasilkan eksklusi sosial dan tiga krisis besar, berupa: ketimpangan sosial, kemiskinan dan kerusakan lingkungan, sehingga perlu paradigma pembangunan baru yang lebih bersifat inklusif.

Hingga akhir 2016, Indonesia belum mengembangkan instrumen untuk mengukur, memantau, dan mengendalikan perkembangan pembangunan ekonomi yang bersifat inklusif

INDONESIA

Perlu nya konsep (dalam bentuk indeks) pembangunan ekonomi inklusif, yang disepakati secara nasional, karena instrumen/indeks pembangunan ekonomi inklusif yang dikembangkan oleh organisasi internasional memiliki konsep yang berbeda-beda.



Mengapa Indonesia Perlu Menyusun Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Tersendiri?

Cerminan untuk Tujuan Pembangunan Indonesia yang lebih spesifik

Indeks Pembangunan/Pertumbuhan Inklusif yang telah dikeluarkan berbagai institusi internasional, dirasa kurang mencerminkan tujuan pembangunan Indonesia secara spesifik

Contoh:

- Tidak adanya fokus kepada isu ketimpangan (gender, wilayah, dan pendapatan)
- Beberapa indikator tidak selaras dengan indikator pembangunan Indonesia

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif – Indonesia:

Dapat membandingkan tingkat inklusivitas antar propinsi/kabupaten/kota sehingga dapat ditentukan arah kebijakan yang tepat untuk tiap provinsi dan keselarasannya dengan tingkat nasional.

Contoh Indikator:

Pendapatan Bersih Gini,
Tabungan Bersih yang disesuaikan,
Intensitas Karbon terhadap PDB,
Utang Publik dan
Rasio Ketergantungan
(data tidak ada di level provinsi)



Konsep Pembangunan Ekonomi Inklusif Untuk Indonesia

DEFINISI

Pembangunan Ekonomi
Inklusif

*Pertumbuhan ekonomi yang **menciptakan akses dan kesempatan yang luas** bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, **meningkatkan kesejahteraan**, dan **mengurangi kesenjangan** antar kelompok dan wilayah*

PILAR I:

Pertumbuhan
Ekonomi Tinggi

(0.50)

PILAR II:

Pemerataan
Pendapatan dan
Pengurangan
Kemiskinan

(0.25)

PILAR III:

Perluasan Akses
dan Kesempatan

(0.25)

Sub-Pilar:

1. Pertumbuhan Ekonomi (0,33)
2. Kesempatan Kerja (0,33)
3. Infrastruktur Ekonomi (0,33)

Sub-Pilar:

1. Ketimpangan (0,50)
2. Kemiskinan (0,50)

Sub-Pilar:

1. Kapabilitas Manusia (0,33)
2. Infrastruktur Dasar (0,33)
3. Keuangan Inklusif (0,33)

TOTAL: 21 INDIKATOR YANG TERSEDIA DI 34 PROVINSI PADA TAHUN 2015-2017

TOTAL INDIKATOR

21

DATA

Data per Provinsi di
Indonesia untuk
tahun 2015-2017
(34 PROVINSI)



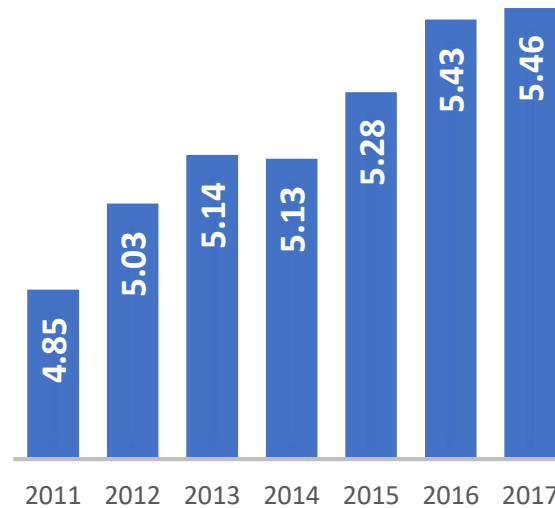
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Tingkat Nasional Tahun 2011-2017



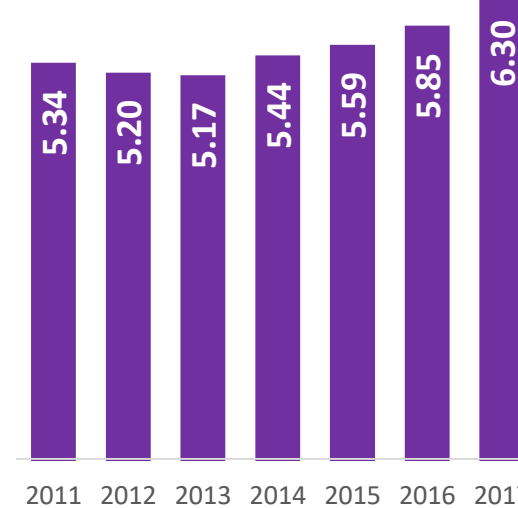
INDEKS PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF



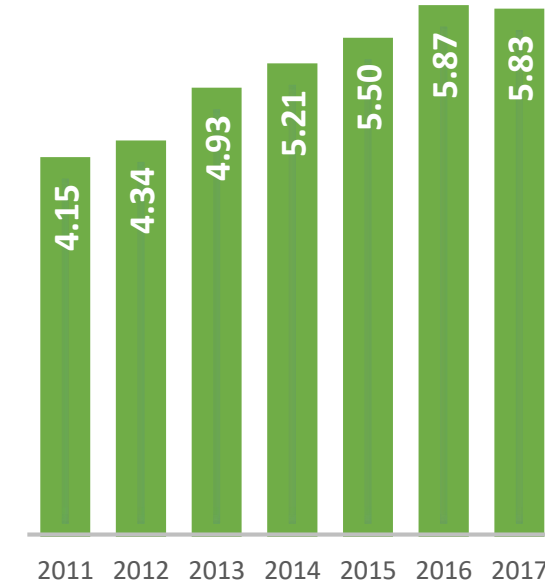
INDEKS PILAR 1: PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN EKONOMI



INDEKS PILAR 2: PEMERTAAN PENDAPATAN DAN PENGURANGAN KEMISKINAN



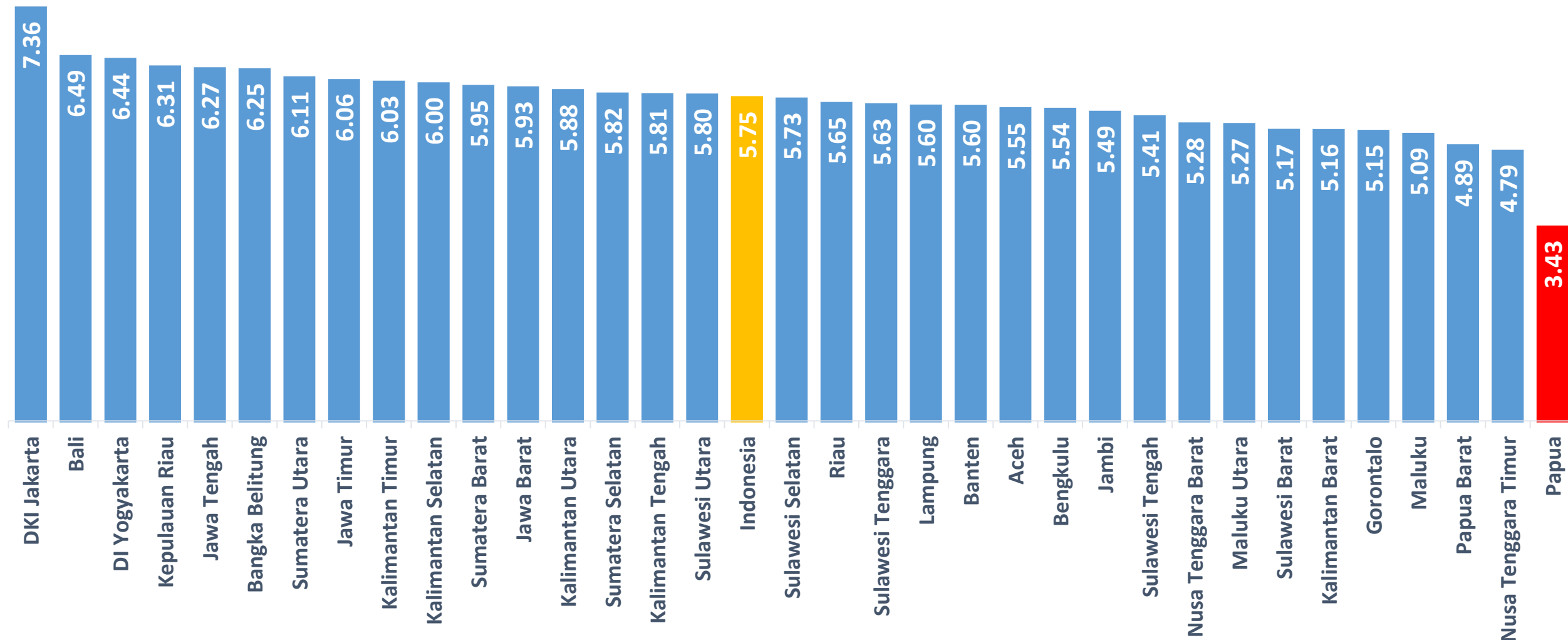
INDEKS PILAR 3: PERLUASAN AKSES DAN KESEMPATAN



- Perhitungan Indeks baru dapat dilakukan hingga tahun 2017. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif tahun 2018 belum dapat dihitung mengingat belum semua indikator dirilis oleh BPS.
- Catatan: nilai 1-3 merupakan kategori “**tidak memuaskan**”, nilai 4-7 merupakan kategori “**memuaskan**” dan nilai 8-10 merupakan kategori “**sangat memuaskan**”



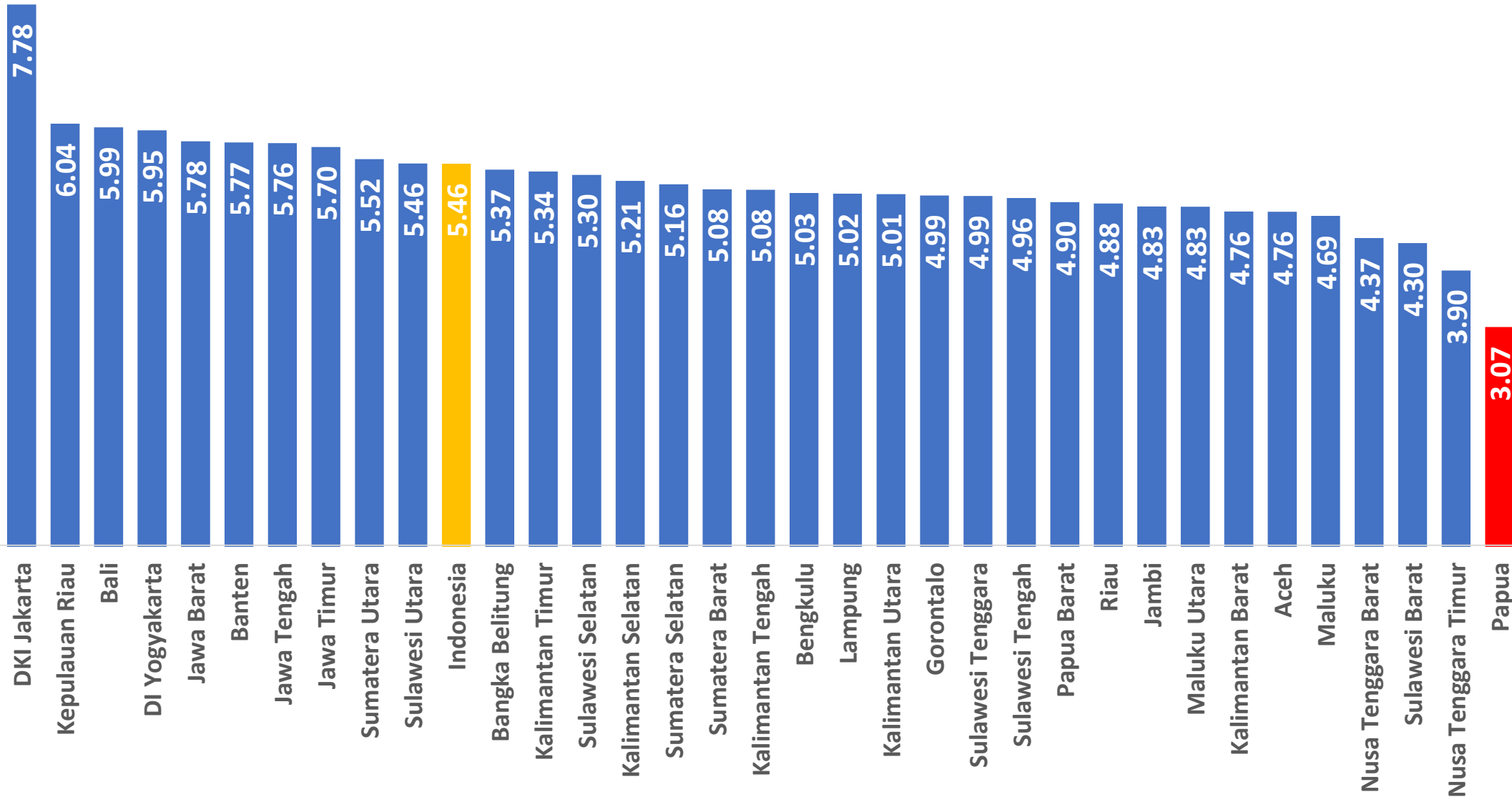
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Tingkat Provinsi Tahun 2017



Catatan: nilai 1-3 merupakan kategori “tidak memuaskan”, nilai 4-7 merupakan kategori “memuaskan” dan nilai 8-10 merupakan kategori “sangat memuaskan”



Pilar I : Pertumbuhan Ekonomi



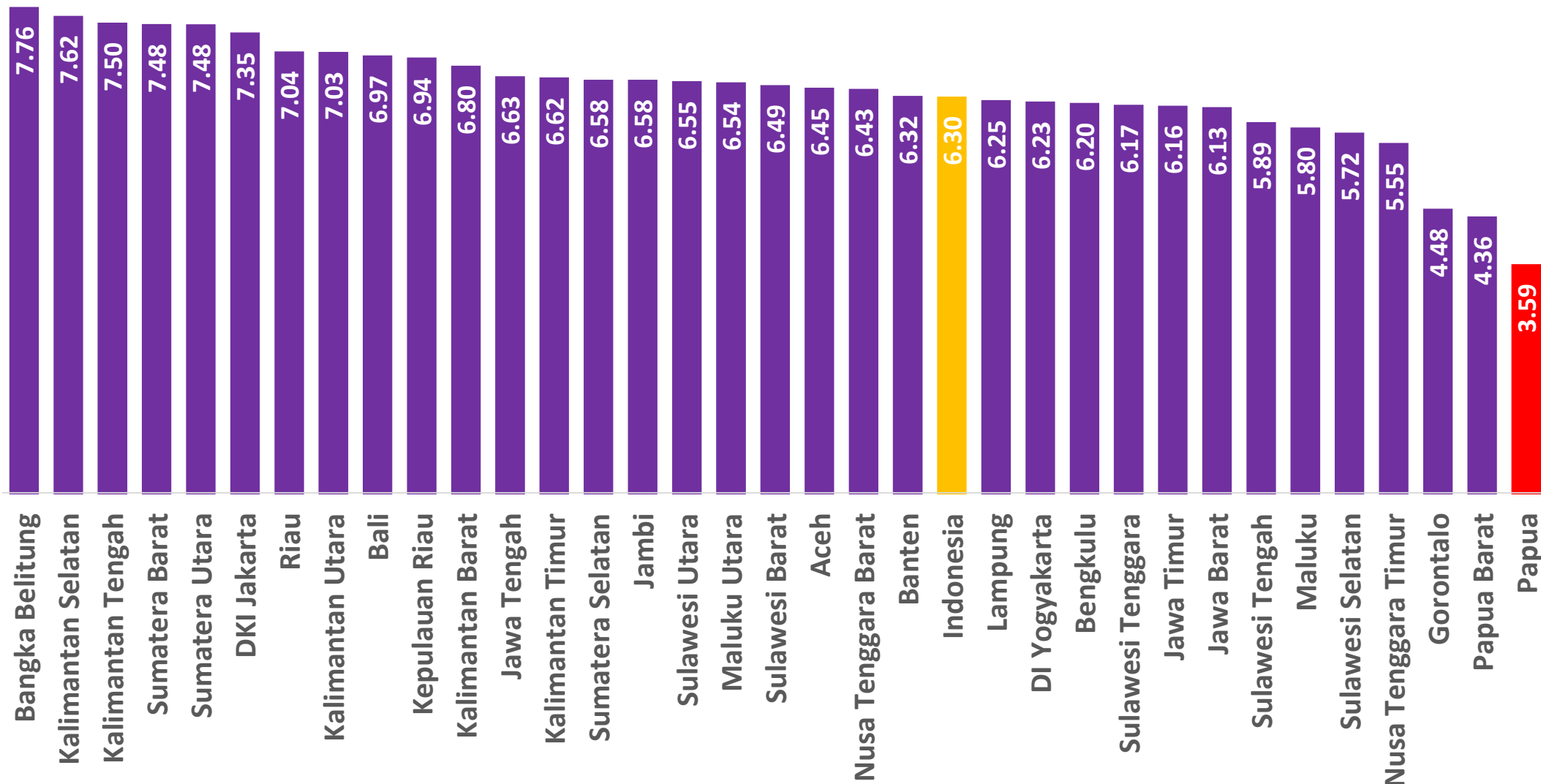
PERTUMBUHAN EKONOMI

DKI Jakarta mendapatkan nilai indeks pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 7,78.

Sedangkan untuk provinsi yang paling tidak inklusif dalam pilar pertumbuhan ekonomi tinggi adalah Papua, dengan nilai 3,07. Nilai Indeks secara nasional adalah **5,46**.



Pilar II : Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan



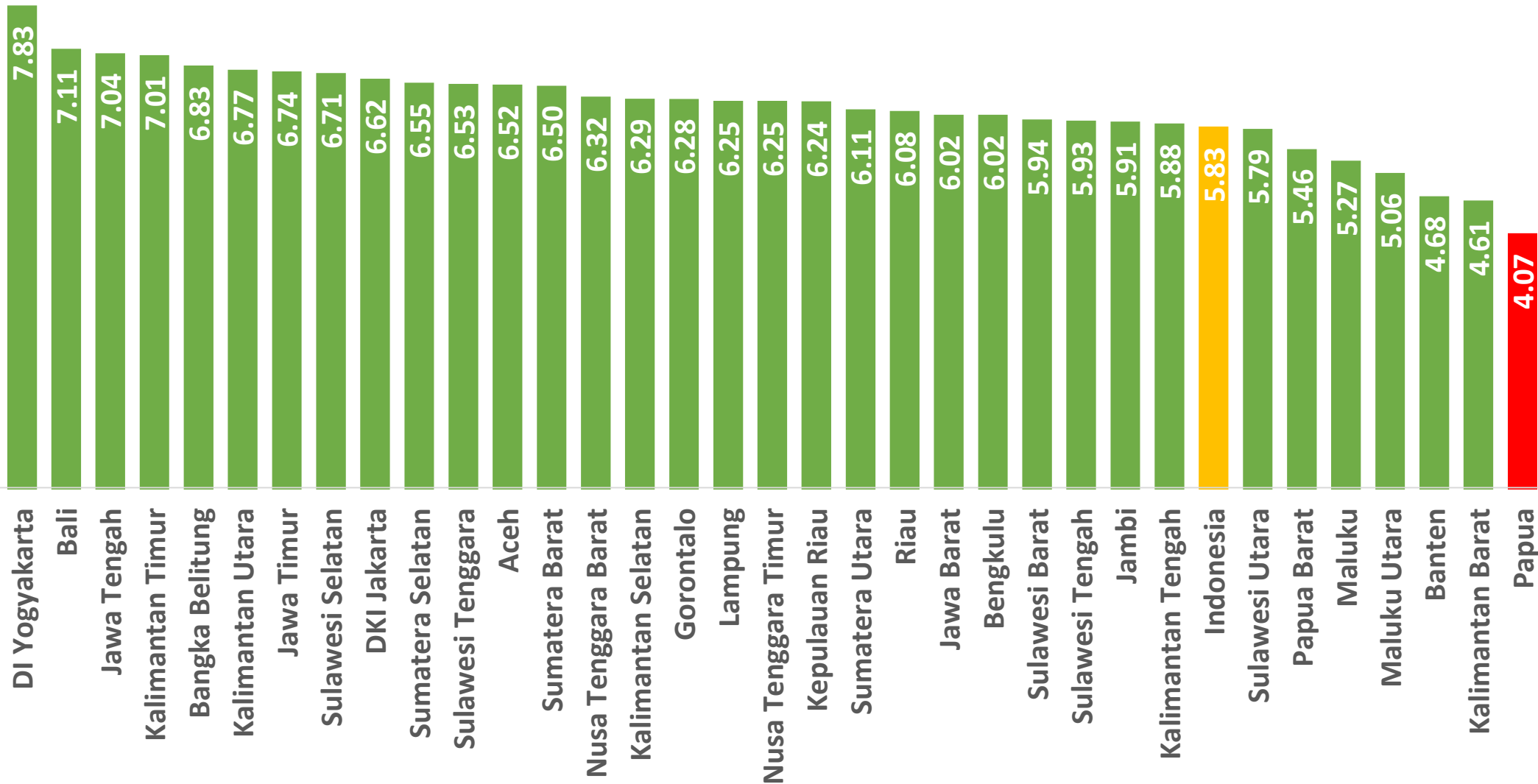
PEMERATAAN PENDAPATAN DAN PENGURANGAN KEMISKINAN

Bangka Belitung mendapatkan nilai indeks pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan tertinggi sebesar 7,76

Provinsi yang paling tidak inklusif dalam pilar ini adalah Papua dengan nilai 3,59. Nilai Indeks secara nasional adalah **6,30.**



Pilar III : Perluasan Akses Dan Kesempatan



PERLUASAN AKSES DAN KESEMPATAN

DI Yogyakarta mendapatkan nilai indeks perluasan akses dan kesempatan tertinggi sebesar 7,83.

Sedangkan untuk provinsi yang paling tidak inklusif dalam pilar perluasan akses dan kesempatan adalah Papua dengan nilai sebesar 4,07. Nilai Indeks secara nasional adalah **5,83**.



PENUTUP

1. Paradigma pembangunan ekonomi kedepan tidak hanya difokuskan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi harus memperhatikan pembangunan yang inklusif
2. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif dapat dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang fokus untuk mendorong pembangunan yang lebih inklusif
3. Diharapkan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dapat memanfaatkan Indeks ini sebagai dasar untuk menetapkan target pembangunan

A stylized map of Indonesia in light blue, set against a dark blue background. Numerous small location pins are scattered across the map, indicating various points of interest or data collection. The map is framed by orange and green diagonal stripes on the left and right sides respectively.

TERIMA KASIH